

Edisi 40 tahun 2013

# Jurnal Ilmu Pemerintahan

Pencerahan Untuk Memajukan Pemerintahan

## DPRD DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

PARLEMEN LOKAL DI INDONESIA  
Cornelis Lay

MERANCANG DPRD DEMOKRASI PRESIDENSIALISME  
Arbi Sanit

RELASI ANTARA DPRD DAN KEPALA DAERAH ERA PILKADA  
Siti Zuhro

PENGARUH RELASI ANTARA DPRD-KONSTITUEN  
DI PROVINSI BANTEN  
Syamsudin Haris

MEMBANGUN REPRESENTASI  
RAKYAT MELALUI PENGUATAN DPRD  
Robert Endi Jaweng



## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i-ii
Daftar Isi	iii
Parlemen Lokal di Indonesia Oleh: Cornelis Lay	1-21
Menuju DPRD Demokrasi Presidensialisme Oleh: Arbi Samit	23-50
Relasi Antara DPRD dan Kepala Daerah Era PILKADA Oleh: Siti Zuhro	51-71
Relasi Antara DPRD-Konstituen Di Provinsi Banten Oleh: Syamsudin Haris	73-87
Membangun Representasi Rakyat Melalui Penguatan DPRD Oleh: Robert Endi Jaweng	89-104
Merancang Sinergitas Antara DPRD dan Masyarakat Difabel di Bantul Oleh: Awang Darumurti	105-123
Politik Uang Dalam PEMILU-PEMILUKADA 2014 Oleh: Zuly Qodir	125-145

arena  
Prihal  
i yang  
olegial  
Pemda  
pada  
fahun  
tar ke  
entasi  
Kita  
kokoh

skripsi

SP.

ndor:

ntang

The  
wcos  
EAS.

dan  
004.  
uran  
ngan

NESIA

## Merancang Sinergitas Antara DPRD dan Masyarakat Difabel Di Bantul

Oleh: Awang Darumurtji<sup>1</sup>

**Abstract**, local Legislative council is regional representative body which have an important task to realize the rights and interests of the local community. Disabled people are also citizens who have same right as ordinary people. For this reason, the rights and interests of disabled people should be respected. The Demands,which is still done by disabled people in Bantul , show that the policy made by local legislative in Bantul still not appropriate with the interests of disabled people in Bantul. This study aims to design a synergy between the Local legislative Council in Bantul with disabled people to realize pro minority policy in Bantul. The research's method used qualitative approach. To collect primary data used interviews, focus group discussions and supported by secondary data. The results show that it needs standardization of policies that fit with the interests of disabled people in Bantul. The concept of synergy could be offered as alternative solutions. Local Legislative council in Bantul can not work alone. They require a synergy with other parties, especially the government and the private sector Bantul.

**Keywords:** *Sinergy, Local legislative, Disabled People, Pro Minority Policy*

<sup>1</sup> Staf pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## Pendahuluan

Lembaga legislasi daerah (*local legislative council*) merupakan institusi yang sangat penting bagi demokrasi dan pembangunan, juga bagi tercapainya potensi demokrasi yang diwujudkan melalui pemilihan umum. Lembaga legislasi daerah adalah lembaga penyampaikan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diubah ke dalam kebijakan. Fungsi utama lembaga ini adalah mewakili kebutuhan, aspirasi, perhatian dan prioritas masyarakat dengan mengartikulasikan masukan serta aspirasi masyarakat, lalu mengubahnya menjadi kebijakan. Fungsi kedua, menyusun peraturan perundang-undangan, peraturan yang mengatur jurisdiksi, termasuk anggaran pemerintah, dijalankan anggota lembaga legislasi daerah dengan selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat. Sementara fungsi ketiga sebuah lembaga legislasi daerah adalah pengawasan, untuk memastikan akuntabilitas politik dan keuangan eksekutif.<sup>1</sup>

DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu. Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah (tidak hanya menyetujui draft yang dipersiapkan oleh pemerintah) dan memainkan peran penting dalam proses pengangguran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi di masyarakat di daerahnnya. Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD pun kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu. Anggota DPRD merupakan pemimpin daerah yang penting dan masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap mereka. Di seluruh Indonesia, tingkat partisipasi pemilih adalah sekitar 80 persen. Seperti yang terungkap pada Survei Tata Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh LGSP pada Tahun 2006, sebagai satu institusi, DPRD yang baru umumnya telah mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai sebuah lembaga.

Tetapi jika kekuasaan DPRD telah meningkat selama sepuluh tahun terakhir dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD sedang bertumbuh, hubungan yang efektif antara masyarakat dan anggota DPRD masih menghadapi banyak tantangan. Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengitamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa. Mereka seringkali merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan

<sup>1</sup> LAGPUSAID, *Peran DPRD dalam menciptakan sinergitas di sektor hukum untuk mewujudkan tata negara*, Jurnal ilmiah nomor 3/09.

khusus  
E  
terga  
berda  
pikir  
akses  
kepe  
serta  
dan  
meru  
kiner

N  
angge  
merel  
DPRD  
untul  
masy  
masil  
regula  
hak k  
APBD  
mend

Ji  
anak  
25.00  
jamin  
perlak  
masal  
lebih  
perus  
Perus  
Kabu  
kaum  
marjir

At  
sinerg  
kebija  
menja

3. Imam  
4. Perma  
Kecamata